



STRATEGI PENYELAMATAN SEKTOR RIIL

Oleh: Mudrajad Kuncoro

Sumber: Harian Seputar Indonesia, 24 Desember 2008

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2008-2013, MS Hidayat, mengatakan, akan fokus pada pengurangan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan mendorong pengembangan usaha padat karya. Diperkirakan jumlah PHK pada kuartal pertama 2009 boleh jadi mencapai 150.000 orang. Sinergi kerjasama Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pemerintah untuk menekan jumlah PHK pada tahun 2009 agaknya merupakan agenda prioritas yang perlu segera diimplementasikan.

Di awal pemerintahannya, Presiden SBY mencanangkan tiga strategi dalam bidang ekonomi, yang disebut tripple strategy, yaitu: mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembali sektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Namun, gelombang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, disusul gempa bumi di DIY dan Jawa Tengah, semburan lumpur panas di Sidoarjo, diikuti tsunami di pantai selatan Jawa, seakan menenggelamkan antusiasme rakyat akan angin perubahan yang dihembuskan oleh pemerintahan SBY-JK. Sebelum krisis keuangan global muncul, perekonomian Indonesia terbukti rentan terhadap berbagai gejolak eksternal dan belum memiliki fondasi dasar yang kokoh.

Belum habis bernafas dihantam bencana alam, tahun ini perekonomian Indonesia dihantam krisis keuangan global. Krisis ini ternyata memberi pelajaran bahwa kapitalisme global terbukti rentan terhadap krisis. Ambruknya perusahaan-perusahaan besar dan global di Amerika Serikat (AS) dan Eropa menjadi headline semua media massa di dunia. Latar belakang dan kronologis krisis keuangan global 2008 secara runtut dan gamblang telah diuraikan dalam buku "Memahami Krisis Keuangan Global" (2008), yang diterbitkan oleh tim Departemen Komunikasi dan Informatika RI. Indeks harga saham gabungan dan nilai kurs ikut merosot drastis yang membuktikan contagion effect, dampak penularan krisis sangat cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak krisis keuangan AS menjalar ke Eropa dan Asia Pasifik dalam bentuk bangkrutnya bank/institusi keuangan/korporasi, meningkatnya inflasi, menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan runtuhnya indeks bursa saham.

Di Indonesia, krisis keuangan global terbukti memporakporandakan pasar modal dan valas. IHSG anjlok dari angka 2.830 menjadi 1.111, atau turun lebih dari 60%. Nilai kurs rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi cukup dramatis dari Rp 9.076 hingga sempat menembus Rp 12.900, atau mengalami depresiasi lebih dari 41% sejak Januari hingga

Desember 2008. Volatilitas memang meningkat tajam di pasar valas dan modal yang terintegrasi dengan pasar keuangan global ini.

Arah Kebijakan

Visi kebijakan industri nasional di masa SBY-JK adalah “pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara industri baru”. Sasaran pembangunan industri di akhir masa jabatan SBY-JK mencakup: (1) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah besar; (2) Terselenggaranya program Revitalisasi, Konsolidasi & Restrukturisasi Industri; (3) Teroptimalisasikannya pasar dalam negeri dalam rangka pembangunan industri komponen lokal & industri pengolah sumberdaya dalam negeri lainnya; (4) Meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor; (5) Tumbuhnya industri potensial yang menjadi motor pertumbuhan industri masa depan; (6) Meningkatnya pertumbuhan industri kecil-menengah (IKM), khususnya Industri Menengah tiga kali lebih cepat dari industri kecil.

Untuk mencapai itu semua, sektor industri ditargetkan tumbuh 8,56% dan menyerap tenaga kerja setidaknya 2,6 juta orang per tahun selama 2004-2009. Faktanya tidak mudah mewujudkan target yang amat optimis tersebut. Selama masa SBY-JK, pertumbuhan industri hanya 7,5% tahun 2004, 5,9% tahun 2005), 5,3% tahun 2006, 5,2% tahun 2007, dan 4,4% sampai triwulan II 2008. Sejak krisis ekonomi Asia sampai dengan 2005 pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit. Perkembangan yang tersendat-sendat ini jauh berbeda dengan masa sebelum krisis 1998 sewaktu sektor industri manufaktur dapat melaju dengan dua digit. Bahkan selama kurun waktu 1994-96 sektor ini tumbuh dengan laju rata-rata dua digit setahun, meskipun dengan laju yang sedikit lebih rendah dibanding dengan kurun waktu 1989-93.

Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting sejak kita menyadari tidak bisa mengandalkan ekspor sektor migas. Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 85% ekspor nonmigas dan sekitar 67% total ekspor Indonesia sejak 1994. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah melampaui ekspor sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an.

Sejak tahun 1993 sumbangan sektor pertanian tidak pernah melebihi sektor industri manufaktur. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian hanya berperan 17,4% terhadap PDB; sementara ekspansi pada hampir semua komoditi industri menyebabkan industri manufaktur menyumbang 23,9% terhadap PDB. Singkatnya, sektor industri manufaktur muncul menjadi penyumbang nilai tambah yang dominan dan telah tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan sektor pertanian. Pada triwulan II 2008, sektor pertanian hanya menyumbang 14,67% terhadap PDB, sementara sektor industri pengolahan menyumbang 27,29% terhadap PDB.

Selamatkan Industri Nasional

Dalam konteks inilah, visi dan sasaran industri tersebut mulai dipertanyakan rakyat. Pasalnya, reformasi sektor riil masih “jalan di tempat” karena sektor ini menghadapi

masalah deindustrialisasi berupa menurunnya jumlah perusahaan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sektor riil masih harus menghadapi masalah menurunnya daya beli konsumen pasca kenaikan harga BBM, resesi yang melanda AS dan Eropa, merosotnya daya saing, serta otonomi daerah yang belum banyak memberikan iklim bisnis yang kondusif di kebanyakan daerah Indonesia.

Dalam konteks inilah, saya menekankan pentingnya perspektif baru dalam kebijakan "targeting" industri. Perdebatan yang terus berlangsung dalam kebijakan industri adalah mengenai efektifitas intervensi pemerintah yang selektif dalam membantu pertumbuhan industri. Secara umum, kebijakan industri dapat diklasifikasikan ke dalam upaya sektoral dan horisontal. Upaya sektoral terdiri dari berbagai macam tindakan yang dirancang untuk mentargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Upaya horisontal dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan di mana perusahaan-perusahaan melaksanakan usahanya. Agaknya di masa mendatang kita memerlukan kebijakan industri yang lebih "antisipatif" atau "pro-aktif" dalam menghadapi banyak perubahan dalam lingkup nasional maupun internasional.

Di bidang industri setidaknya ada tiga elemen kebijakan: Pertama, mengembangkan sektor manufaktur yang memiliki daya saing yang tinggi, Kedua, restrukturisasi industri secara terencana menuju industri yang produktivitas dan nilai tambahnya tinggi. Ketiga, strategi bisnis internasional dan domestik yang agresif. Membangun pilar-pilar industri yang kokoh di masa depan perlu difokuskan pada industri penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan produktivitas, pengembangan kluster industri, pembangunan industri yang berkelanjutan, persebaran industri dengan penekanan pengembangan industri kecil dan menengah serta berbasis kompetensi inti daerah.

Bagi pelaku bisnis di sektor riil tampaknya dibutuhkan stimulan kebijakan yang lebih mendasar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran tampaknya akan dirasakan pada semester pertama 2009. Saat itu Indonesia sibuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat dan presiden. Dalam konteks inilah, beberapa stimulan kebijakan berikut amat mendesak untuk dilakukan:

Pertama, perlunya insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Diturunkannya atau dihapusnya pajak ekspor dan bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang masih diimpor dari luar negeri akan amat membantu dunia usaha.

Kedua, usulan untuk memberi stimulus bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendesak adalah diturunkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor kapas maupun kapas dalam negeri, diturunkannya suku bunga untuk mendorong investasi, dan mempercepat restitusi pajak. Ini perlu didukung adanya rescue program untuk sentra-sentra UMKM yang dalam kondisi "darurat" akibat gempa, lumpur panas, dan bencana alam lainnya.

Ketiga, menggarap alternatif pasar di luar AS dan Eropa secara lebih serius. Alternatif pasar tersebut adalah Timur Tengah, Tiongkok, dan India. Peluang ekspor Indonesia di Uni Emirat Arab, misalnya, yang memiliki GNP per kapita lebih dari US\$ 42.000 ini masih terbuka lebar untuk komoditas perhiasan, barang dari kulit, elektronika, mobil dan komponennya, serta garmen dan tekstil. Sinergi antara Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Pemda, dan Kadin, perlu lebih

diintensifkan untuk melakukan penetrasi produk dan pasar di kawasan Teluk maupun pasar-pasar yang prospektif lainnya.

Menggerakkan sektor riil, khususnya industri manufaktur, perlu menjadi prioritas saat ini. Sudah saatnya berhenti menebar pesona, beralih menjadi menebar aksi. Semoga perubahan yang dijanjikan tidak hanya sekedar mitos.

Prof. Mudrajad Kuncoro, PhD adalah guru besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; Chief economist PT Recapital Advisors; <http://www.mudrajad.com>.